

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF di Singapura pada tanggal 19-20 September 2006 yang lalu telah membawa banyak perubahan bagi IMF. Pertemuan tersebut mengundang kritikan tentang disetujuinya kuota lebih besar untuk Cina, Turki, Meksiko, dan Korea Selatan. Lebih dari 90 persen anggota menyetujui rencana reformasi hak suara IMF dalam pertemuan paruh tahun tersebut. Sementara 10 persen negara lainnya, terutama yang berasal dari Amerika Latin dan Timur Tengah, menolak. Ini dikarenakan apabila satu atau lebih negara mendapat lebih banyak suara, maka yang lainnya harus mau mengalah.<sup>1</sup>

Menteri Keuangan Inggris Gordon Brown, yang mengetuai IMF dan Komite Keuangan, menyampaikan usulan reformasi itu di Singapura. IMF yang beranggotakan 184 negara itu masih harus melakukan pemungutan suara terhadap proposal yang ditujukan untuk memperkuat kekuatan suara 4 negara tadi, guna mencerminkan bertambahnya pengaruh mereka dalam ekonomi global. Para pejabat IMF mengutarakan, mereka berharap akan merevisi formula kuota suara itu bagi semua anggota menjelang tahun 2008.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Konsep*, 20 September 2006

Selama ini sejak terjadinya Perang Dunia II, lembaga donor internasional yang bermarkas di Washington DC itu hak votingnya didominasi oleh tiga raksasa dunia, yakni Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Sementara negara-negara berkembang maupun sedang berkembang, hak suaranya terpinggirkan. Hak voting itu digunakan untuk menentukan negara mana yang akan mendapat bantuan.

Dengan formula hak suara yang ada kini yaitu suara terbanyak dipegang negara kaya (Amerika Serikat pemegang suara terbesar), tidaklah terlalu sulit bagi negara-negara kaya untuk mengegolkan usulan ini. Jadi, protes dan kritik dari negara miskin atas formula itu, karena antara lain akan menyebabkan negara-negara Afrika kehilangan suaranya sebesar 2,5 persen, adalah teriakan yang tidak digubris<sup>3</sup>

Besar kecilnya suara di IMF ditetapkan berdasar kuota. Sedangkan besar kecilnya kuota sebuah negara dinilai dari besarnya PDB, besarnya cadangan, dan keadaan perdagangan. AS adalah negara anggota dengan kuota terbesar dan yang terkecil adalah Palau<sup>4</sup> (lihat lampiran 1). Meskipun volume total GDP Cina tahun lalu sudah melonjak ke nomor 4 di dunia, yakni satu kali lipat daripada volume total GDP Belgia dan Belanda, tetapi hak suara kedua negara itu adalah 1,5 kali lipat daripada Cina. Besar kecilnya kuota inilah yang menentukan hubungan negara anggota dengan IMF, termasuk besar iuran, besarnya hak suara, dan luasnya akses terhadap pembiayaan. Seluruh anggota IMF memiliki hak suara

---

<sup>3</sup> *Jakarta Post*, 15 September 2006

dasar ditambah berapa besar kuota yang dimiliki. Jadi, lagi-lagi AS memiliki suara terbanyak dan Palau memiliki suara terkecil.

IMF merupakan organisasi moneter internasional antar pemerintah, yang didirikan pada tanggal 27 Desember 1945. Sejak berdirinya, hak suara IMF kebanyakan dikuasai oleh negara-negara industri. Amerika, Eropa, Jepang dan Kanada mempunyai lebih kurang 63 persen hak suara, dan mempunyai keunggulan dominan mutlak dalam pengambilan kebijakan mengenai urusan penting IMF. Sedangkan Seluruh negara berkembang kini hanya memiliki suara lebih kurang 37 persen dari seluruh suara di IMF. Besarnya suara di IMF ditentukan seberapa besar iuran negara itu pada IMF.

Nyata sekali, kuota hak suara IMF dewasa ini sudah tidak dapat sepenuhnya mencerminkan keadaan ekonomi internasional. Diambilnya keputusan oleh IMF dalam sidangnya di Singapura untuk menambah hak suara empat negara Cina, Korea Selatan, Meksiko dan Turki, patut dipuji sebagai perbaikan yang mengikuti arus perkembangan. Sudah barang tentu bertambahnya hak suara Cina, Korea Selatan, Meksiko dan Turki akan membantu negara-negara itu memperoleh lebih banyak hak suara dalam IMF, dan juga memungkinkannya memperoleh lebih banyak bantuan dana dari organisasi tersebut.

Pertama, berdasarkan peraturan IMF, pinjaman uang setiap anggota secara akumulasi tidak boleh melebihi 300% kuotanya. Dengan bertambahnya lebih banyak kuota, jumlah kredit yang akan diperoleh negara terkait dari IMF juga

akan bertambah, berarti SDRnya pun bertambah. Kedua, dengan hak suara yang lebih banyak di IMF, negara-negara itu akan memainkan peranan lebih besar dalam pengambilan kebijakan. Dalam upaya IMF mengusahakan perkembangan seimbang global, kestabilan moneter dan pengentasan kemiskinan, negara-negara berkembang dengan hak suara yang bertambah akan dapat mengurangi syarat-syarat khusus yang disertai oleh negara-negara Eropa dan Amerika ketika memberikan bantuan kepada negara lain, sehingga asas tujuan IMF dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Negara berkembang sendiri memiliki pengertian sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Istilah ini mulai menyingkirkan Dunia Ketiga, sebuah istilah yang digunakan pada masa Perang Dingin<sup>5</sup>.

Negara-negara di dunia ini yang termasuk kedalam kategori negara berkembang banyak sekali, Michael P. Todaro menyebutkan terdapat tujuh karakteristik umum negara berkembang, yaitu:

- A. Standar hidup (*level of living*) yang relative rendah sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah dibandingkan dengan standar di negara maju, ketimpangan pendapatan yang parah, kurang memadainya pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan. Sebutan rendah itu bukan

---

<sup>5</sup> ... ..

hanya dalam pengertian global, yakni apabila dibandingkan dengan standar hidup orang-orang di negara kaya, namun juga dalam pengertian domestik, yakni bila dibandingkan dengan golongan elit di negara mereka sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut dimanifestasikan secara kuantitatif dalam bentuk jumlah pendapatan uang yang sangat sedikit (kemiskinan), perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, harapan hidup yang relative sangat singkat, dan peluang mendapatkan pekerjaan yang rendah. Negara yang dikategorikan Negara berpendapatan tinggi yaitu Negara yang memiliki pendapatan US\$ 8.356 atau lebih, sedangkan untuk Negara yang berpendapatan sedang yaitu US\$ 6.75 sampai US\$ 8.355, dan untuk Negara berpenghasilan rendah yaitu US\$ 6.75 atau kurang.<sup>6</sup>

- B. Tingkat produktifitas rendah, hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya kekuatan dan kesehatan fisik para pekerja akibat dari rendahnya tingkat pendapatan.
- C. Tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi. Pada tahun 1995, total penduduk dunia telah mencapai sekitar 5,8 miliar jiwa, dan lebih dari tigaperempat dari jumlah tersebut hidup di negara-negara dunia ketiga. Sedangkan yang menghuni negara-negara maju hanya sekitar seperempatnya. Diantara kedua kelompok tersebut terdapat

---

<sup>6</sup> Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan* Ekonoia, Yogyakarta, hal 21

perbedaan tingkat kelahiran maupun tingkat kematian yang sangat mencolok. Tingkat kelahiran dinegara-negara berkembang pada umumnya sangat tinggi yaitu berkisar antara 30-40 untuk setiap 1000 penduduk, sedangkan angkanya di negara-negara maju kurang dari setengahnya.

- D. Angka pengangguran, terbuka maupun terselubung, yang sangat tinggi dan akan terus bertambah tinggi, sementara penyediaan lapangan kerja semakin terbatas. Tingkat pengangguran terbuka di dunia ketiga rata-rata mencapai 10 persen hingga 15 persen dari total angkatan kerja perkotaan. Namun itu belum semuanya. Pengangguran ternyata banyak dijumpai dikalangan penduduk yang umurnya antara 15-24 tahun dan banyak diantaranya yang memiliki pendidikan tinggi (untuk jenis ini, jumlahnya hampir dua kali lipat tingkat pengangguran rata-rata).
- E. Ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada produksi sektor pertanian serta ekspor produk-produk primer (bahan-bahan mentah). Sebagian besar penduduk negara-negara dunia ketiga hidup dan bekerja di daerah pedesaan. Lebih dari 65 persen jumlah penduduk negara berkembang tinggal secara permanen, bahkan turun temurun, dipedesaan; sedangkan penduduk di negara-negara maju yang tinggal di desa-desa kurang dari 27 persen. Demikian pula dengan angkatan kerja. Sekitar 62 persen angkatan kerja di dunia ketiga mencari nafkah di sektor pertanian

sedangkan di negara maju hanya sekitar 7 persen. Sumbangan sektor pertanian terhadap GNP di negara-negara berkembang secara keseluruhan masih berkisar pada angka 20 persen; bandingkan dengan sumbangannya di negara-negara maju yang hanya mencapai 3 persen.

F. Pasarnya tidak sempurna, dan informasi yang tersedia sangat terbatas.

Pada dekade 1980-an dan 1990-an, hampir setiap negara berkembang beralih ke ekonomi pasar. Namun, di banyak negara berkembang, perangkat hukum/legal, budaya dan institusionalnya, masih sangat lemah guna mendukung beroprasinya mekanisme pasar secara efektif dan efisien. Dalam situasi di mana kepastian hukum begitu minim, jelaslah bisnis takkan dapat diharapkan berkembang dengan baik. Sarana infrastruktur dan keuangan adalah masalah berikutnya. Tanpa adanya jalan-jalan raya, sistem telekomunikasi, listrik, atau sistem perbankan yang sangat kuat, maka perekonomian pasar sulit diharapkan akan tumbuh secara memuaskan.

G. Dominasi, ketergantungan dan kerapuhan yang parah pada semua aspek hubungan internasional. Ketergantungan terhadap negara-negara maju dalam soal penyediaan bantuan resmi luar negeri, pembukaan akses pasar bagi produk-produk ekspor, serta berbagai bentuk pinjaman, adalah masalah-masalah ruwet berikutnya yang harus dihadapi sebagian besar

negara dunia ketiga. Karakteristik umum berikutnya tersebut adalah

tingginya ketergantungan, yang seringkali diwarnai oleh dominasi, dunia ketiga kepada negara maju yang memang menguasai perekonomian dunia, baik dalam hal dana pinjaman resmi, dana investasi swasta, transfer teknologi, maupun akses pasar.<sup>7</sup>

Pada dekade 1980-an dan 1990-an hampir keseluruhan negara berkembang beralih kesistem ekonomi pasar yang dianjurkan oleh Bank Dunia (*World Bank*) sebagai syarat dari pemberian bantuan ekonomi.<sup>8</sup>

Dewasa ini Cina merupakan negara yang mempunyai banyak kepentingan bersama dengan negara-negara berkembang lainnya. Apabila hak suara Cina bergabung dengan hak suara negara-negara berkembang, maka itu pasti akan memainkan peranan yang lebih besar. Dengan hak suara yang bertambah, Cina akan berusaha dengan sekuat tenaga mendorong mekanisme pengambilan kebijakan IMF berkembang ke arah yang menguntungkan keseimbangan negara-negara industri dan negara-negara berkembang.

Bertambahnya kuota Cina dalam IMF salah satunya disebabkan karena bobot ekonomis Cina yang terus meningkat. Perekonomian Cina yang sebelumnya digerakkan melalui komune pertanian dengan kesengsaraan yang berkepanjangan, sekarang tiba-tiba muncul sebagai sebuah kekuatan dunia baru

---

<sup>7</sup> Michael D. Todaro, *Perkembangan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, hal 51-75

ditengah-tengah gencarnya globalisasi dengan menempatkan dirinya sebagai pusat manufaktur terbesar di dunia.<sup>9</sup>

Perkembangan ekonomi Cina tak lepas dari adanya pengaruh dari luar, hal ini ditandai dengan maraknya peredaran produk barang dari barat dan beredarnya produk-produk Cina di pasaran dunia. Perekonomian Cina berkembang dari industri yang mempunyai lingkup kecil tapi mampu dipasarkan di pasaran dunia. Manufaktur merupakan industri yang menyumbang devisa terbesar pada awal perkembangan ekonomi Cina, namun kemudian disusul dengan tumbuhnya industri lain dari industri alat berat sampai industri persenjataan dan militer serta diimbangi dengan perdagangan yang maju pesat. Pertumbuhan ekonomi Cina yang mengalami peningkatan dan pada tahun 2000 meningkat melebihi target yang telah ditentukan yaitu mencapai 8% dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8,9 triliun yuan (US\$ 1,078 milyar) sehingga merupakan nilai PDB terbesar selama ini yang melebihi US\$ 1 triliun.<sup>10</sup>

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Cina mengalami peningkatan yang cukup pesat sehingga dapat dikatakan bahwa Cina sedang bersaing dengan Jepang yang dianggap sebagai negara penguasa ekonomi Asia. Cina berusaha menyamakan diri dengan Jepang dalam perekonomiannya dan berupaya untuk melakukan persaingan secara terbuka untuk menjadi

---

<sup>9</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0208/29/in/terb28.htm>, di download pada tanggal 16 November 2006.

<sup>10</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0208/29/in/terb28.htm>, di download pada tanggal 16 November 2006.

penguasa Asia. Dengan bertambahnya hak suara Cina dalam IMF, maka itu menunjukkan bahwa Cina memiliki peran yang besar dalam perekonomian dunia. Selain itu, Cina juga memiliki peran yang lebih besar dalam IMF, sehingga mempunyai kesempatan untuk memperbaiki mekanisme pengambilan keputusan di IMF, seperti yang diharapkan oleh Negara-negara berkembang.

## **B. Pokok Permasalahan**

Dari latar belakang di atas maka dapat ditarik pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Cina merespon harapan Negara berkembang mengenai mekanisme pengambilan keputusan di IMF?

## **C. Kerangka Pemikiran**

### ***Teori Peranan***

Dalam menjelaskan perilaku politik luar negeri maka perilaku atau peranan aktor internasional harus dipahami dalam konteks sosial. Kita tidak akan menjelaskan fenomena politik kalau kita hanya melihat individu terlepas dari konteks sosial.

Perilaku para pembuat keputusan politik luar negeri, misalnya selalu dibatasi oleh lingkungannya. Salah satu kendala itu adalah peranan atau serangkaian peranan yang dipergunakan dalam proses politik. Peranan (role)

adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.<sup>11</sup> Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada suatu posisi. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.

Menurut John Wolke, teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Maka kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Teori peranan memandang individu sebagai seseorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. Kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral.<sup>12</sup> Institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dan peran-peran ini adalah komponen-komponen yang membentuk institusi dengan kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.<sup>13</sup>

Berdasarkan asumsi teori peranan yang dikemukakan oleh Alan C. Isaak dalam bukunya "Scope And Methods of Political Science", menyatakan bahwa perilaku politik seorang aktor politik itu sebagai akibat dari harapan sebagaimana

---

<sup>11</sup> Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat analisa dan teorisasi*. Hal 44

<sup>12</sup> Harold dan Margaret Sprout, *Toward Politics of The Planet Earth* (New York: Van Nostrand. 1971) dan Denis Pirage, *Global Ecopolitics*, (Duxbury 1978)

<sup>13</sup> Mohtar Mas' oed, *op. cit.*, Hal 45

posisi yang dipegangnya. Dalam buku yang sama menyatakan bahwa ada dua sumber harapan, yaitu “outsider” dan “insider”<sup>14</sup>. Harapan dari dalam tersebut muncul dari aktor pemegang posisi tertentu yang berkaitan dengan fungsi dan tugas yang sedang diembannya. Sedangkan harapan dari luar tersebut datang dari masyarakat luas yang dapat mempengaruhi perilaku aktor pemegang posisi tertentu.

Cina sebagai Negara yang mendapatkan tambahan hak suara dalam IMF, diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan posisi yang dipegangnya. Negara berkembang banyak menaruh harapan kepada Cina agar dapat membawa aspirasi Negara-negara berkembang dalam hal keseimbangan antara Negara maju dan berkembang dalam pengambilan keputusan. Selama ini, kesalahan dan kekeliruan menganalisis situasi ekonomi Negara berkembang dan berbuntut pada pemberian “obat yang salah” tidak bisa dilepaskan dari tidak adanya keseimbangan kekuatan antara Negara kaya dan miskin yang antara lain ditunjukkan dalam system pengambilan keputusan yang tidak adil dalam tubuh IMF sendiri.

Bagi Cina, Cina mempunyai banyak kepentingan yang sama dengan negara-negara berkembang yang lain. Penambahan hak suara Cina akan memainkan peranan yang lebih besar melalui kerjasama dengan negara-negara tersebut. Cina berharap dapat menjadi kekuatan utama dalam upaya membentuk

suatu tatanan politik melalui perannya sebagai wakil dari negara-negara berkembang.

Kembalinya perhatian Cina kepada negara berkembang ini memang mulai tampak, semenjak memburuknya hubungan Beijing-Washington menyusul tragedi Tiananmen. Keinginan untuk menjadi pemimpin dunia ketiga ini juga dapat dilihat dalam pidato PM Li Peng di depan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, 5 September 1990. Li Peng mengatakan “Cina telah memperkuat hubungan antar pemerintah dan non-pemerintah dengan negara-negara yang berbatasan dengan RRC, dan berhasil meningkatkan kerjasama dan persahabatan dengan dunia ketiga”, karena memperkuat hubungan dan kerjasama dengan negara-negara berkembang merupakan dasar politik luar negeri Cina.

Perubahan Republik Rakyat Cina pada tahun 1949 menjadikan Cina memasuki fase baru dalam bidang hubungan diplomatik. Dari tahun 1949 hingga akhir tahun 1950an, Cina telah menjalin hubungan diplomatik dan mengembangkan hubungan kerjasama persahabatan dengan negara bekas Uni Soviet dan berbagai negara sosialisisme. Setelah pertemuan Asia-Afrika yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955, sejumlah negara Asia dan Afrika telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Hingga tahun 1956, sebanyak 25 negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina.

Dari akhir 1950an sampai penghujung 1960an, Cina berturut-turut menandatangani perjanjian persahabatan dan perjanjian kerjasama ekonomi dan

teknologi dengan Guinea, Ghana, Mali, Kongo, Tanzania dan negara-negara lain dan mendukung perjuangan bersenjata yang dilancarkan oleh Angola, Guinea-Bissau, Mozambik, Zimbabwe dan Namibia untuk meraih kemerdekaan dan perjuangan yang dilancarkan oleh rakyat Afrika Selatan untuk menentang rasisme orang kulit putih. Cina juga menawarkan bantuan milyaran dollar AS untuk mengatasi kemiskinan dan penghapusan hutang demi keamanan sumber daya alam Afrika bagi perekonomian Cina yang sedang berkembang pesat. Kepentingan itu pula yang membuat Cina bersedia bekerjasama dengan Sudan, yang dituduh melanggar hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Cina juga berturut-turut telah menyelesaikan masalah perbatasan dengan Myanmar, Nepal, Mongolia dan Afghanistan dan telah menyetujui perjanjian dengan negara-negara tersebut. Cina telah menandatangani perjanjian perbatasan dengan Pakistan dan telah menyelesaikan masalah dwikewarganegaraan tentang keturunan Cina di Indonesia. Sampai tahun 1969, sebanyak 50 negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina.

Bulan Oktober tahun 1971 merupakan perubahan penting dalam urusan diplomatik Cina. Pada waktu itu, dengan dukungan banyak negara berkembang, sidang PBB ke-26 telah mengesahkan resolusi 2758 untuk memulihkan hak sah Republik Rakyat Cina di PBB dan segera mengusir wakil Partai Kuomintang dari PBB. Sejak saat itu, Cina telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara

Di akhir tahun 1970an sampai penghujung tahun 1980an, dengan pemikiran diplomatik Deng Xiaoping, Cina telah menormalisasi hubungan dengan Amerika Serikat, Jepang dan Eropa barat dan telah memperbaiki hubungan dengan negara-negara bekas Uni Soviet dan mengembangkan secara menyeluruh hubungan dengan negara-negara dunia ketiga.

Sejak tahun 1990an, pucuk pimpinan generasi ke-3 China yang dipimpin oleh Jiang Zemin mewarisi dan mengembangkan pemikiran diplomatik Deng Xiaoping telah mengembangkan hubungan kerjasama persahabatan dengan berbagai negara di dunia dan bersama-sama dengan negara tersebut mendorong penumbuhan kerjasama politik dan ekonomi antar negara yang baru. Cina berturut-turut memulihkan hubungan diplomatik dengan Indonesia, menjalin hubungan diplomatik dengan Singapura dan Brunei Darussalam dan mewujudkan normalisasi hubungan dengan Vietnam dan Mongolia.

Pada tahun 1996, Presiden Jiang Zemin berkunjung ke 3 negara Asia selatan dan menetapkan meneruskan perundingan China dengan India, Pakistan, dan Nepal menjalin hubungan baik untuk menghadapi abad ke-21. Cina juga dengan aktif mengembangkan hubungan dengan negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, Eropa timur dan tengah. Hubungan Cina dengan negara-negara Afrika di sebelah selatan Sahara dan Amerika Latin diperkuat dan ditingkatkan.

10 negara Amerika Latin telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina

Politik luar negeri Republik Rakyat Cina (RRC) memiliki citra tersendiri. Pada hakikatnya politik luar negeri Cina tidak saja didasarkan pada kepentingan nasional dan pemikiran tradisional Cina, tetapi juga dilandasi oleh suatu teori pembagian dunia yang digunakan Cina yaitu "Teori Tiga Dunia". Di dalam teori ini kawasan Asia-Pasifik menempati prioritas tertinggi sebab negara-negara kunci yang terlibat langsung dengan kepentingan Cina secara geografis terletak di kawasan ini. Misalnya saja Rusia, Amerika Serikat (AS) digolongkan dalam dunia pertama. Kemudian Jepang dalam dunia kedua, dan negara-negara sedang berkembang seperti negara-negara anggota ASEAN digolongkan dalam dunia ketiga. Uniknyanya secara teoritis Cina memasukkan dirinya ke dalam dunia ketiga. Bersama-sama dengan negara lainnya dari dunia ketiga, Cina ingin membentuk suatu *front* persatuan guna menghadapi kaum imperialis, hegemonis. Dengan kata lain, bagi Cina *front* persatuan dunia ketiga ini dimaksudkan untuk menghadapi baik dunia pertama maupun kedua.

Untuk mencapai ambisinya itu sejak awal 1970-an politik luar negeri Cina lebih mengedepankan kepentingan nasional terutama kepentingan keamanan dan kepentingan ekonomi daripada kepentingan ideologi. Era baru ini ditandai oleh Komunike Shanghai tahun 1972 berupa normalisasi hubungan dengan negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dan kemudian diikuti oleh normalisasi hubungan antara Cina dengan Jepang pada tahun yang sama. Lebih lanjut, strategi *front* persatuan) kepentingan nasional Cina sejak saat itu yakni menentang

hegemonisme dan mendukung perdamaian dunia; berusaha mempersatukan kembali Taiwan ke dalam wilayah Cina (Taiwan dianggap sebagai provinsi yang membangkang); mempercepat konstruksi sosialis dengan empat program modernisasi di bidang pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan.<sup>16</sup>

Kini strategi besar kepentingan nasional Cina tersebut sudah memasuki hampir empat dekade. Hal ini berarti jati diri negara-bangsa (*nation state*) Cina pun telah banyak berubah. Dalam kancah politik internasional Cina sudah eksis sebagai salah satu negara besar yang sangat berpengaruh dalam menyuarakan kepentingan dunia ketiga di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Di bidang ekonomi dengan program modernisasi "lompatan jauh ke depan" yang dirintis oleh Deng Xiaoping sejak awal 1980-an, Cina telah menunjukkan sebagai kekuatan ekonomi dunia yang diproyeksikan akan mengalahkan Amerika Serikat di tahun 2020.

Sedangkan di bidang pembangunan militer Cina masih terus berupaya untuk dapat sejajar dengan AS dan Rusia. Dewasa ini Cina sudah dapat membuktikan bahwa kekuatan militernya sudah meningkat lagi melalui keberhasilan uji coba senjata anti satelit baru-baru ini. Secara khusus, untuk penguasaan teknologi perang ruang angkasa Cina sudah dapat berbangga diri sejajar dengan AS dan Rusia. Keberhasilan uji coba senjata anti satelit ini

kepentingan nasionalnya yang dirancang sejak tahun 1970-an. Sejarah membuktikan bahwa negara Cina sudah berhasil melalui kesemua tahapan strategi besarnya tersebut dengan gemilang.<sup>17</sup>

Namun demikian, ditengah capaian yang luar biasa tersebut, Cina masih masuk pada kategori negara yang berpendapatan perkapita rendah yaitu US\$ 470.<sup>18</sup> Sebagai gambaran, pada tahun 2004, masih terdapat 30 juta penduduk hidup dalam kemiskinan. Bahkan masih terdapat 26,1 juta penduduk pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan pertahun kurang dari 78 dollar AS. Selama 26 tahun UNDP lewat program pangan dunia memberi bantuan makanan dan perbaikan infrastruktur bagi penduduk miskin Cina.

Di Cina sendiri, terdapat disparitas yang mencolok antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah yang satu dengan yang lain. Hal tersebut memberi gambaran kepada kita bahwa Cina sesungguhnya baru mencapai tahap awal modernisasi, meskipun dengan capaian-capaian yang pantas membuat iri negara-negara berkembang lainnya.

Tanda abad baru ialah dunia menjadi perbagai pola dan globalisasi ekonomi terus berkembang. Cina merupakan negara berkembang yang mempunyai penduduk terbesar di dunia. Pembangunan Cina memerlukan dunia dan begitu juga sebaliknya, pembangunan dunia juga memerlukan Cina.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan*, Ekonosia, Yogyakarta, hal 21

#### **D. Hipotesis**

Dengan melihat permasalahan yang ada, serta dikaitkan dengan kerangka pemikiran dan data sementara, maka penulis menetapkan jawaban sementara, yaitu:

Cina merespon harapan Negara berkembang dengan membentuk suatu aliansi negara berkembang dan lebih mengintensifkan lobi-lobi terhadap negara maju.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Menjawab rumusan masalah yang ada dan membuktikan hipotesis yang ada.
2. Menambah pengetahuan kalangan pembaca tentang peran Cina dalam IMF pasca sidang tahunan di Singapura.
3. Menggambarkan tentang perkembangan ekonomi Cina dan IMF
4. Sebagai manifestasi dari pengaplikasian teori yang penulis dapatkan selama masih duduk di bangku kuliah.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian dan menghindari kesulitan dalam mencari data, maka penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada seputer peran Cina dalam

IMF dari awal menjadi anggota sampai pada sidang tahunan di Singapura 2006. Namun tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan data-data diluar tahun tersebut yang masih dianggap relevan.

### **G. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka teori, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris.

Studi Pustaka Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, majalah, jurnal, kliping koran, dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan.

Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori yang telah ditetapkan. Meskipun menganalisa data sekunder, penulis yakin bahwa penelitian ini tidak akan mengurangi kebenarannya ilmiahnya, Insaallah.

### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada BAB I berisi tentang pendahuluan, dimana dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka

Pemikiran/Teori yang Digunakan, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan terakhir Sistematika Penulisan.

Pada BAB II, penulis lebih banyak mendeskripsikan tentang IMF seperti, Sejarah dan Perkembangan Internatinal Monetary Fund (IMF), Kuota IMF, Ragam Bentuk Pinjaman IMF, dan yang terakhir Special Drawing Right (SDR).

Pada BAB III, penulis akan mengulas mengenai Bertambahnya Kuota Cina, mulai dari Pertumbuhan Ekonomi Cina, sampai pada Kuota Baru yang dimiliki Cina.

Pada BAB IV, penulis akan menjabarkan dan membahas tentang harapan negara berkembang samapi pada upaya yang dapat dilakukan Cina untuk merespon harapan Negara berkembang tersebut, seperti membentuk suatu Aliansi Negara Berkembang, dan Mengintensifkan Lobi Terhadap Negara Maju.

Pada BAB V, penulis akan memberikan kesimpulan dari seluruh bab yang